

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Bank Amartha Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam

Ilmu Syari'ah

Oleh :

TIWI PRAMESTY

NPM : 1621020329

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANGDISABILITAS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi di Bank Amartha Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana dalam

Ilmu Syari’ah

Oleh :

TIWI PRAMESTY

NPM : 1621020329

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam jangka waktu yang lama dimana ketika berhadapan dengan hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifi mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kesamaan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini sebagai landasan operasional dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera dan mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research*, yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan populasi dan sampel, Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Bank Amarta Cabang Lampung Selatan tidak berjalan dengan maksimal. Bank Amarta Cabang Lampung Selatan tidak mempekerjakan penyandang disabilitas karena mekanisme kerja pada Bank Amarta lebih banyak di lapangan sehingga tidak memungkinkan bagi Bank Amarta untuk merekrut karyawan penyandang disabilitas. Hukum Islam juga menegaskan bahwa Allah SWT melarang manusia membedakan fisik. Dan Allah SWT memerintahkan kepada manusia yang beriman harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang terkandung dalam QS An Nisa ayat 59 bahwa kewajiban muslim adalah mendengar dan taat kepada imamnya baik ia senang maupun benci selama tidak disuruh berbuat dosa. Kepada Bank Amarta agar merekrut penyandang cacat sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan kepada Pemerintah harusnya lebih mengawasi setiap perusahaan supaya dapat mempekerjakan para penyandang disabilitas



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiwi Pramesty

NPM : 1621020329

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan), adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis,



Tiwi Pramesty

NPM. 1621020329



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmih Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi
di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda
Lampung Selatan).**

**Nama : Tiwi Pramesty
NPM : 1621020329
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung
Bandar Lampung, Agustus 2020

Pembimbing I

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002**

Pembimbing II

**Eko Hidayat S. Sos, M.H.
NIP. 197512302003121002**

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M. Si

NIP. 19800315200911017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)**, disusun oleh: **Tiwi Pramesty, NPM: 1621020329, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syari'ah** pada Hari/Tanggal: **Senin, 21 September 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji Utama : Dra. Firdaweri, M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. M. Aruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
نَزَعْنَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



*”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dantaatilahRasul (Nya),
danulilamri di antarakamu. Kemudianjikakamuberalinan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
danRasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian.”*

(QS AnNisa (4) ayat 59)



PERSEMBAHAN

Allhamdullilah Hirhabbil 'Alamin dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Penyanyang lagi Maha Pengasih. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan dan do'a dari orang-orang yang sangat kusayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Prasojo dan Ibunda Murti Rahayu yang telah ikhlas mengasuh dan mendidikku. Ucapan terima kasih atas kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang begitu besar dan mulia. Berkat cucuran keringat dan do'a tulusmu penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sampai bisa mendapatkan gelar S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik tercinta Imam Alfarizi dan Akbar Baihaqi yang telah memberikan dukungan, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikanku di UIN Raden Intan Lampung.
3. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung dan khususnya kepada dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Yang ku banggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap TIWI PRAMESTY, dilahirkan di Desa Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Juni 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara, dengan seorang ayah yang bernama Prasojo dan seorang ibu bernama Murti Rahayu. Untuk pertamakalinya menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak Nurul Khoir Tangerang Bantenlulus tahun 2004, SD Negeri 3 Langkapura lulus tahun 2010, SMP Negeri 14 Bandar Lampung, lulus tahun 2013, SMA Negeri 16 Bandar Lampung, lulus tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan kejenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan prodi Jurusan Siyasaah (Hukum Tata Negara Islam) di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2020

Yang Membuat,

TIWI PRAMESTY

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Khairudin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Frenki, M.Si. dan Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Siyasah Syar'iyah.
3. Dr. Hj. Zuhraini., S.H., M.H dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
4. Segenap dosen dan staff karyawan Fakultas Syari'ah.
5. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Prasajo dan Ibunda Murti Rahayu, adik-adikku serta keluarga besar saya yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

6. Sahabat terbaiku Ayu Erza, Budi Pramono, Bayu Anggoro yang telah menemani saya selama penelitian skripsi ini.
7. Keluarga besar KKN 107 Desa Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan oleh karena batasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis

TiwiPramesty

NPM. 1621020329

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas	18
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	18
2. Macam – Macam Penyandang Disabilitas	21
3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas	24
4. Tujuan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas	33
B. Disabilitas Dalam Hukum Islam	36
1. Subjek Hukum Islam	37
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	38
3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah	41
C. Tinjauan Pustaka	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Amarta	53
1. Sejarah Bank Amarta	58
2. Kegiatan Bank Amarta	59
3. Cara Kerja Bank Amarta	59
4. Keamanan Berinvestasi di Amarta	61
5. Struktur Organisasi Bank Amarta Cabang Lampung Selatan	61

B. Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Bank Amarta Cabang Lampung Selatan	66
---	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan).”

Adapun istilah–istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah penerapan peraturan perundang – undangan yang berisi tentang penyandang disabilitas.⁴⁶
2. Disabilitas atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam jangka waktu yang lama dimana ketika berhadapan dengan hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifi mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai–nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum Indonesia.⁴⁷

⁴⁶<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas> diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 20.08 WIB

⁴⁷Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (yogyakarta:LKIS Pelangi Aksara),2016, h 22.

3. Perspektif yaitu suatu cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.⁴⁸
4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁴⁹

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)” adalah penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang bagaimana kesetaraan penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan ditinjau dari sudut pandang Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang membuat penulis tertarik dalam memilih judul tersebut adalah :

1. Alasan objektif, alasan objektifnya adalah penulis ingin mengulas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif fiqh siyasah di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan.
2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

⁴⁸Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syariah*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2018), h 18.

⁴⁹Iriyani, Eva (2017). ". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.

C. Latar Belakang Masalah

Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, demikianlah isi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mereka perlu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keistimewaan masing masing.

Kesamaan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini sebagai landasan operasional dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera dan mandiri.

Pasal 11 Undang Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, adalah:

1. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
2. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
3. Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
4. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
5. Mendapatkan program kembali bekerja;
6. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
7. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
8. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.⁵⁰

Penyandang disabilitas ingin bekerja mandiri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pendampingan kepada penyandang

⁵⁰ Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Cetakan Pertama*, PUSHAM UII, (Yogyakarta: 2015), h 23

disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan masyarakat inklusi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan, maka perlu disadari bersama bahwa penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas adalah menjadi hak penyandang disabilitas, sekaligus menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, serta Perusahaan Swasta. Sehingga, perlu dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

Salah satu wujud dari bersikap adil dan menjaga hak-hak orang lain adalah tidak melakukan tindakan diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara misalnya, ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pekerjaan. Sebuah tindakan diskriminatif atau tidak setara, jika situasi

sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama.

Islam memandang para penyandang disabilitas yang wajib diperhatikan karena beberapa alasan kuat. Paling mendasar ialah atas nama kemanusiaan. Satu fakta yang tak bisa dimungkiri bahwa mereka sama-sama makhluk Allah SWT yang wajib dihormati. Apalagi, para penyandang tersebut juga manusia yang dimuliakan oleh Allah. Pentingnya kasih sayang dan memuliakan sesama ini juga ditekankan oleh Rasulullah.

Sesama manusia (*ukhuwah insaniyyah*), mereka juga pada hakikatnya adalah saudara dari satu garis keturunan, yaitu Adam. Persaudaraan ini akan semakin bermakna jika diperkuat dengan saling tolong-menolong. Di sisi lain, bila yang bersangkutan adalah Muslim maka penekanannya akan bertambah. Sebab, ia juga merupakan saudara seiman. Maka, iman tersebut akan semakin sempurna dengan saling mencintai dan mengasihi. Perwujudannya, lewat saling tolong-menolong. Memperhatikan para penyandang difabel dikategorikan pula sebagai bentuk perbuatan baik yang diperintahkan Allah.

Bank Amarta adalah salah satu bank swasta yang menangani perkreditan. Bank Amarta menjembatani kebutuhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan modal dengan kebutuhan investor akan *return*. Dengan layanan online, tujuan yang ingin dicapai adalah memperluas menjangkau investor dan mitra peminjam. Meski layanannya berbasis online, Amarta tetap melakukan aktivitas offline dengan terjun ke lapangan secara langsung dalam setiap tahap proses pembiayaannya, terutama dalam hal penyeleksian mitra peminjam.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas. Adapun tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah memberikan perlindungan hukum seluas-luasnya terhadap penyandang disabilitas mengenai aspek-aspek kehidupan, antara lain:

- a. Hak bebas dari stigma
- b. Hak hidup
- c. Hak untuk pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai hak untuk pekerjaan, meliputi hak-hak:

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah swasta tanpa ada diskriminasi.
- b. Memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.
- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.
- e. Mendapatkan program kembali bekerja.
- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat
- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.

- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.⁵¹

Sasaran utama dari layanan Amarta adalah ibu-ibu pelaku UMKM yang memiliki usaha rumahan, tetapi *unbankable* dalam hal permodalan. Oleh sebab itulah, Amarta melakukan survei langsung agar bisa menilai kelayakan usaha dan melakukan pendampingan. Proses ini dilakukan sekaligus sebagai upaya untuk menjaring calon peminjam yang berkualitas dan meminimalkan risiko. Sebab itulah Bank Amarta memerlukan pegawai yang cekatan, handal dan memiliki penampilan yang menarik.

Perusahaan selalu mencari karyawan terbaik untuk dipekerjakan. Etos kerja dan produktivitas lantas kerap kali diasosiasikan dengan tampilan fisik. Masih dilekatkan pada mereka yang memiliki cacat fisik dianggap tak bisa produktif salah satunya, Apalagi di dalam lingkungan perbankan yang rata-rata berpenampilan menarik. Penyandang disabilitas masih sulit memperoleh pekerjaan baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta. Pada akhirnya para penyandang disabilitas lebih memilih untuk berwirausaha atau bahkan mengemis di jalanan agar dapat mempertahankan hidupnya..

Ditinjau dari penjelasan di atas, penulis menduga bahwa Bank Amarta tidak mempekerjakan penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 11 Tentang Penyandang Disabilitas

Perspektif Hukum Islam (Studi di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan).”

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan menurut hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan.
2. Ingin mengetahui tinjauan menurut hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dalam sudut pandang hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan dibidang Siyasah dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.⁵² Untuk memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula.

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.⁵³

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 160

⁵³Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, h 15

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilaksanakan dan menggambarkan secara lengkap.⁵⁴

2. Sumber Data

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.⁵⁵ Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁵⁷ Adapun yang menjadi sumber data

⁵⁴*Ibid*, h. 21

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 127

⁵⁶*Ibid*, h 129

⁵⁷*Ibid*, h 130

primer dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁵⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi, buku – buku, dan situs internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian, populasi didenifisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.⁵⁹ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek, yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 9 orang.

b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.⁶⁰ Teknik pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau

⁵⁸*Ibid*, h 93

⁵⁹*Ibid*, h 94

⁶⁰Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, h 131

20-25% atau lebih.⁶¹ Sampel pada penelitian ini adalah 3 orang pegawai Bank Amarta Kantor Cabang Lampung Selatan meliputi 1 orang *Branch Manager* Bank Amarta Cabang Lampung Selatan, 1 orang *Supervisor* Bank Amarta Kantor Cabang Lampung Selatan, dan 1 orang *Staff Marketing* Bank Amarta Kantor Cabang Lampung Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.⁶²

a. *Observasi*

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶³

b. **Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

⁶¹*Ibid*, h 140

⁶²*Ibid*, h 140

⁶³Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Afabeta, h

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁶⁴

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus.⁶⁵

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada 1 orang *Branch Manager* Bank Amarta Cabang Lampung Selatan, 1 orang *Supervisor* Bank Amarta Kantor Cabang Lampung Selatan, dan 1 orang *Staff Marketing* Bank Amarta Kantor Cabang Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁶⁶

5. Metode Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-

⁶⁴ *Ibid*, h 137

⁶⁵ *Ibid*, 247

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 202.

benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.⁶⁷

Penulis melakukan penelitian pada Bank Amarta karena Bank Amarta tidak mempekerjakan penyandang disabilitas walaupun ada beberapa pelamar pekerjaan yang mengajukan lamaran di Bank Amarta. Tetapi tidak dilakukan perekrutan pada penyandang disabilitas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.⁶⁸

c. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen.

Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistika baik statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang

⁶⁷*Ibid*, h 203.

⁶⁸*Ibid*, h 49

diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.⁶⁹

d. Interpretasi Hasil Pengolahan Data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.⁷⁰

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷¹ Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk

⁶⁹*Ibid*, h 49

⁷⁰*Ibid*, h 50

⁷¹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 48-49.

menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Metode analisis data dalam penelitian ini berdasarkan metode analisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Metode deduktif berasal dari bahasa inggris deduction yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.⁷² Deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus..

Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan.⁷³ Jadi metode deduktif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara analisis kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan umum menjadi khusus.



⁷²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 273

⁷³*Ibid*, h 274

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁹

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.³⁰

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan cacat mental.³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

³⁰ Eko Riyadi, at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta, Pusham UII, 2012), h. 293

³¹ *Ibid*, h 36

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai *“A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”*.³² Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Dalam Undang-Undang HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.³³

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.³⁴

Penyandang disabilitas yang dialami setiap orang ditentukan dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seseorang mengalami disabilitas adalah :

- a. Mendapati kekurangan fisik (cacat) sejak lahir, dari segi keturunan ataupun
- b. Dari segi kecacatan karena lain hal semasa masih di dalam kandungan.

Sedangkan disabilitas dari faktor eksternal adalah:

³²<https://daksablog.wordpress.com/hari-internasional-penyandang-disabilitas-international-day-of-person-with-disabilities-idpwd/>, diakses pada 10 Juni 2020

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

- a. Musibah atau bencana alam
- b. Kecelakaan kerja
- c. Adanya suatu penyakit yang diderita sehingga membahayakan diri orang tersebut jika tidak dilakukan suatu tindakan medis

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.³⁵

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaanya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.³⁶ Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.³⁷

Di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hukum, artinya hak itu diatur oleh hukum. Hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa hak asasi manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggar kekuasaannya (*abuse of power*).

³⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 16.

³⁶ OC.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung: 2006, h 49.

³⁷ *Ibid*, h 35

Sebaliknya apabila hak asasi manusia dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka hak asasi manusia tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau alat memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum.

2. Macam – Macam Jenis Disabilitas

Disabilitas atau yang biasa dikenal dengan istilah penyandang cacat ini memiliki beberapa macam jenis disabilitas yang dimiliki oleh orang penyandang *difabel*, yaitu:

a. Buta (tuna netra)

Orang buta adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat suatu obyek dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya maupun dirasakannya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan sebagian (parsial) yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

b. Tuli (tuna rungu)

Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bias kembali mendengar dengan baik.

c. Bisu (tuna wicara)

Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain, memiliki keterbatasan yang nyata untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain yang normal. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir

yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang juga bisa mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu

d. Cacat Fisik (tuna daksa)

Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya.³⁸

e. Keterbelakangan Mental (tuna grahita)

Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari – hari.

f. Cacat Pengendalian Diri (tuna laras)

Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.

g. Cacat Kombinasi (tuna ganda)

Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan bunting sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain – lain.³⁹

³⁸ T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.121

³⁹ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b8cf8abc7dc4/kesempatan-kerja-bagipenyandang-cacat>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020

Dari penjelasan tentang macam-macam penyandang disabilitas maka disimpulkan bahwa yang dapat dipekerjakan pada suatu dinas atau perusahaan swasta adalah golongan cacat fisik. Hal ini disebabkan karena mereka hanya mengalami kekurangan di bagian fisiknya saja.

3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1) bahwa :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak penyandang disabilitas adalah :

1. Bebas dari stigma
2. Privasi
3. Keadilan dan perlindungan hukum
4. Hidup
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas
14. Pelayanan Publik
15. Pelindungan dari bencana
16. Habilidadasi dan rehabilitasi
17. Konsesi
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁴¹

⁴⁰ Undang Undang Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Diaturnya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai warga Negara.⁴²

Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai warga Negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang Penyandang Disabilitas yang juga merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikategorikan ke dalam hak-hak relatif. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian Penyandang Disabilitas, bahwasanya kaum Penyandang Disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia.

Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya. Bahkan dunia internasional juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kaum Penyandang Disabilitas, hal ini terbukti dengan adanya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Konvensi PBB yang dilaksanakan pada 3 Mei 2008 ini bertujuan untuk

⁴² Pasal 26 ayat (1) UUD1945

mempromosikan, melindungi dan menjamin penuh terpenuhinya hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi bagi kaum penyandang cacat (disabilitas).⁴³

Prinsip-prinsip yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah:

1. Menghormati martabat yang melekat pada setiap individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.
2. Non-Diskriminasi
3. Secara penuh dan efektif berpartisipasi dan ikut serta dalam masyarakat
4. Menghargai perbedaan dan penerimaan para penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Persamaan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
8. Penghormatan terhadap kapasitas berkembang anak-anak penyandang cacat dan menghormati hak anak-anak penyandang cacat untuk mempertahankan identitas mereka.⁴⁴

Aksesibilitas bagi penyandang cacat berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah :

1. Pembangunan jalan, bangunan, transportasi serta fasilitas indoor dan outdoorsekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja yang mampu memenuhi kebutuhan *difabel* untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

⁴³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009), h 70

⁴⁴ *Ibid*, h 76

2. Pemberian informasi, komunikasi, dan layanan lain seperti pelayanan elektronik dan layanan darurat yang juga mendukung tercapainya kemandirian dan partisipasi penuh *difabel* dalam segala aspek kehidupan.⁴⁵

Guna tercapainya aksesibilitas yang telah diatur dalam konvensi ini, negara-negara peserta mengambil langkah berupa :

1. Mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum.
2. Memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum yang ditawarkan oleh pihak swasta telah memperhitungkan semua aspek bagi aksesibilitas bagi para *difabel*.
3. Memberikan pelatihan kepada pemegang kepentingan pada isu aksesibilitas yang dihadapi oleh *difabel*.
4. Menyediakan huruf *braille* dan *braille signage* pada bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.
5. Memberikan bantuan hidup dan perantara, termasuk panduan, pembaca dan juru bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.
6. Mempromosikan bentuk-bentuk lain yang sesuai bantuan dan dukungan bagi para *difabel* untuk menjamin akses mereka terhadap informasi.
7. Mempromosikan akses bagi para *difabel* terhadap informasi baru dan sistem teknologi komunikasi termasuk internet.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

8. Menggalakkan desain, pengembangan, produksi dan distribusi informasi dan komunikasi dapat diakses dengan teknologi dan sistem pada tahap awal, sehingga teknologi dan sistem ini dapat dicapai dengan biaya minimum.⁴⁶

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak Sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, yang meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, dipandang sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya.

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat (disabilitas) adalah bahwa

⁴⁶ *Ibid*, h 77

mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya.⁴⁷

Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada Penyandang Disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang menyerah, putus asa dan hanya menunggu belas kasihan namun ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.

Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam Perlindungan hak-hak pekerja Penyandang Disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwujudan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya negara menjamin setiap orang

⁴⁷ Istifarroh dan Wihi Cahyo Nugroho, “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swata dan Perusahaan Milik Negara”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 1, Juli 2019, h 3

⁴⁸ *Ibid*, h 4

termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yang kemudian juga secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

1. “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”
2. “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”⁴⁹

Masih banyak ditemukan pengumuman penerimaan calon pegawai atau karyawan yang salah satu poinnya mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani serta berpenampilan menarik. Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, sehingga maknanya pun sangat umum. Arti sehat jasmani dapat dimaknai bahwa selain seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dia juga terbebas dari segala penyakit. Sedangkan sehat rohani dapat juga diartikan bukan hanya sehat secara mental (psikis) namun juga sehat secara moral.

Berpenampilan menarik, harus bisa rapi tanpa ada kekurangan satu apa pun. Hal ini tentunya sangat mendiskriminasikan para Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti pekerja yang non disabilitas. Hal berikutnya yang perlu diperjelas dalam hal ini adalah posisi disabilitas, apakah termasuk dalam situasi sehat jasmani dan rohani, atau tidak. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, terutama dalam level undang-undang, pengaturan mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami perubahan, yaitu pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani,

⁴⁹ Undang Undang Nomor 8 tahun 2006 Pasal 53 ayat 1

sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat (disabilitas) adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani.

Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang pada penjelasan Pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani. Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden pun tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.

Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya Penyandang Disabilitas sudah diatur didalam undangundang hak asasi manusia tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku, sampai sekarang masih banyak Penyandang Disabilitas yang merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminatif. Keberadaan Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya diakui, bahkan tak jarang Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan karena keadaan fisiknya.

Penyandang Disabilitas bagi sebagian orang masih dipandang sebagai seseorang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap Penyandang Disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi pribadi yang dimaksud di sini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi pribadi tersebut adalah sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau

perkumpulan dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.⁵⁰

4. Tujuan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa ada sikap membeda-bedakan atau diskriminasi, maka diperlukan peraturan khusus untuk menjamin perlindungan hukum para penyandang disabilitas. Peraturan khusus ini bertujuan untuk dapat mengatasi masalah pengangguran yang terutama banyak dialami oleh pekerja penyandang disabilitas.⁵¹

Upaya pemerintah untuk menyamaratakan kesempatan kerja bagi golongan yang sudah produktif patut dihargai. Karena melalui peraturan perundang-undangan yang khusus untuk difabel, para penyandang disabilitas dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pekerja yang non disabilitas.⁵²

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas. Adapun tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah memberikan perlindungan hukum seluas-luasnya terhadap penyandang disabilitas mengenai aspek-aspek kehidupan, antara lain:

- d. Hak bebas dari stigma
- e. Hak hidup
- f. Hak untuk pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.

⁵⁰ Better Work Indonesia, *Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan*, (Jakarta: Better Work Indonesia Publication), h 4

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵² <http://www.centroone.com/news/2012/07/2m/pemda-harus-jamin-hak-pilih-penyandang-cacat/printpage>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai hak untuk pekerjaan, meliputi hak-hak:

- i. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah swasta tanpa ada diskriminasi.
- j. Memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.
- k. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan
- l. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.
- m. Mendapatkan program kembali bekerja.
- n. Penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat
- o. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.
- p. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.⁵³

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap penyandang cacat ini regulasinya selain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Perlindungan ini antara lain :

1. Penyediaan aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Pemberian alat kerja
3. Pemberian alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.⁵⁴

Perlindungan ini merupakan bentuk pengakuan HAM yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu tertera dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42. Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh.

Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu dalam sejarah perkembangan masyarakat. Negara tidak diperkenankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa undang-undang (*legislative policy*) maupun berupa peraturan-peraturan pelaksanaan (*bureaucracy policy*) yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak-hak konstitusional, terutama hak-hak pekerja/buruh disabilitas. Namun negara wajib menjamin pelaksanaan hak konstitusional penyandang disabilitas untuk bekerja.⁵⁵

B. Disabilitas Dalam Hukum Islam

Penyandang disabilitas umumnya disebut sebagai orang yang mengalami gangguan, keterbatasan, atau berkemampuan kurang untuk melakukan aktivitas yang dilakukan orang pada umumnya. Persoalan disabilitas kurang mendapatkan perhatian khusus sehingga terlihat adanya generalisasi dalam penyediaan kebutuhan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, adanya ayat – ayat al Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 47

bagian penyandang disabilitas menunjukkan bahwa secara umum al Qur'an mengakui keberadaan kelompok tersebut.

a. Subjek Hukum Islam

Al Quran bukan saja kitab suci yang diperuntukkan untuk manusia, akan tetapi juga banyak berbicara mengenai manusia. Al Quran menguraikan tentang manusia bukan saja dari sudut pandang statusnya, baik secara vertikal maupun horizontal, melainkan juga membicarakan mengenai keadaan, kondisi serta tata cara peribadatan kepada Allah swt. Semua urusan serta hukum dunia hingga akhirat dibahas dalam al-Quran.

Tidak terlepas pula tentang disabilitas di dalamnya. Isu tentang disabilitas terbilang relatif baru dikarenakan tidak semua kalangan memahami terutama masyarakat awam. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penjelasan dalam al Quran tentang kelompok disabilitas secara spesifik tidak seperti penjelasan tentang hukum dan aturan beribadah dan ketauhidan. Persoalan Disabilitas tidak secara spesifik disebut dan mendapat perhatian serta kajian, baik dalam literature utama umat Islam al Quran dan Hadis maupun dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Hal tersebut bukan dikarenakan penyandang disabilitas belum ada pada saat ajaran Islam mulai diturunkan, melainkan jauh sebelum Islam penderita disabilitas sudah mulai ada.

Beberapa kemungkinan sehingga persoalan disabilitas tenggelam dalam catatan sejarah dan menjadi wilayah yang tak terpikirkan. Yakni karena Islam memandang netral mengenai persoalan disabilitas ini, Islam memandang bahwa kondisi disabilitas bukan anugerah dan apalagi kutukan Tuhan. Lebih dari itu, Islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh daripada melihat persoalan fisik seseorang.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Keberadaan penyandang disabilitas dalam ayat – ayat al Qur‘an yang relatif sedikit jumlahnya, tidak lain dikarenakan Islam memandang netral kepada penyandang disabilitas. Hal ini berarti bahwasannya Islam sepenuhnya menyamakan para penyandang disabilitas sebagaimana manusia lainnya. Pada dasarnya perbedaan keduanya hanya terletak pada adanya kelainan yang disandangnya. Kelainan ini bisa terletak pada fisik, mental, sosial, atau bahkan perpaduan dari ketiganya.

Penyandang disabilitas merupakan sebutan bagi seseorang yang mengalami keadaan atau kapasitas diri yang berbeda dari orang – orang pada umumnya. Penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain ialah disabilitas intelektual dan pengembangan, disabilitas fisik, disabilitas sensoris (indera), hambatan atau masalah pada perilaku, kesulitan belajar, serta cerdas dan bakat istimewa.⁵⁶

Karena kondisi tersebut, mereka termasuk populasi minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam isu sosial budaya pun mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat kepada mereka dan mereka dianggap tidak pantas dengan standard lingkungannya.⁵⁷ Kurangnya perhatian kepada orang – orang yang membutuhkan, khususnya terhadap penyandang disabilitas inilah yang membuat adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat sehingga mereka begitu rawan dengan tindakan diskriminasi. Sikap seperti itu merupakan ekspresi kekikiran dan kesempitan berpikir yang paling puncak serta sebuah kelemahan manusia yang mendasar.⁵⁸

Lebih spesifik Al-Quran secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas dalam QS An Nur Ayat 61 yang berbunyi :

⁵⁶ Aini Mahabbati, Kebijakan, “Implementasi, dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol III, No 1 (Juni 2014/1435), h 32

⁵⁷ Ibid, h 34

⁵⁸ Fazlur Rahman, *Tema – Tema Pokok Al-Qur‘an* (Bandung: Mizan, 2017), h 54.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
 عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَاةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (QS An Nur ayat 61)

Sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik.⁵⁹

Menurut Adh Dhahhak berkata: mereka sebelum ada pengutusan merasa keberatan dari makan bersama orang-orang tersebut (orang buta, pincang, dan sakit) karena kotor dan jijik, agar mereka tidak mengutamakan mereka, maka turunlah ayat ini.⁶⁰ Orang buta, orang pincang dan orang sakit, boleh kita bawa makan di rumah-rumah itu. Diakhirnya

⁵⁹ Ahmad Mustafa Al Maraqli, *tafsir Al Maraqli*, terj Bahrin Abu Bakar dkk (Semarang:Pt Karya Toha Putra,1993), Jilid 18, h 247

⁶⁰ Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), Jilid 4, h 942.

dijelaskan lagi bahwasanya apabila kita masuk kedalam rumah (rumah keluarga, rumah bapak mu dan lain-lain) maka hendaklah ucapkan salam seketika hendak masuk.⁶¹

Dalam QS An Nur ayat 61 secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.
2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
4. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.
5. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.
6. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.

c. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), juzu 18, h 231

swt., meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

" Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. "(QS At Tin ayat 4)

Penegasan Allah Swt telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik yang psikis mengandung arti fisik dan psikis manusia itu perlu dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Fisik manusia dipelihara dan ditumbuh kembangkan dengan memberi gizi yang cukup dengan menjaga kesehatannya. Dan psikis manusia dipelihara dengan memberinya agama dan pendidikan yang baik. Apabila fisik dan psikis manusia dipelihara dan ditumbuh kembangkan, maka manusia akan dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada alam ini. Dengan demikianlah akan menjadi makhluk termulia.⁶²

Seperti dalam tafsir ayat 4 surah at-tin, setelah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat atau tempat-tempat yang mulia itu, Allah Swt menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi dan psikis terbaik. Dari segi fisik misalnya, hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya bebas berpikir, yang menghasilkan ilmu dan tanganya bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya, sehingga melahirkan teknologi. Manusia adalah yang paling indah dari semua makhluk-Nya. Dari segi psikis hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna dan manusia juga yang beragama.⁶³

⁶² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Kerasiaan Al-Qur'an Juz Amma*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 378

⁶³ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Terj. Edisi Baru, (Jakarta : 2009), hlm.99

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,” (HR. Bukhari Muslim)

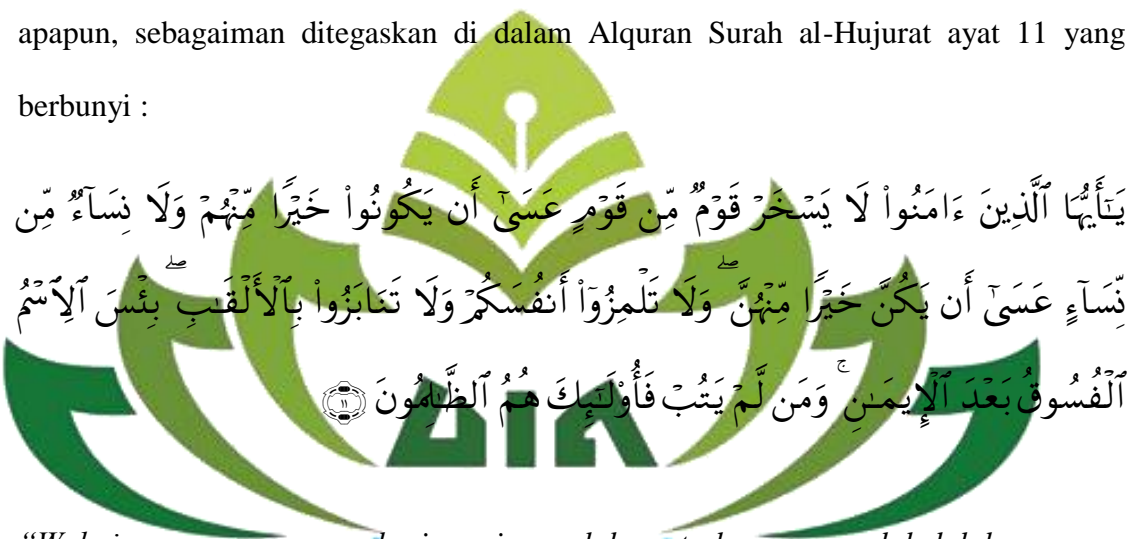
Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan *egaliter* serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Alquran sendiri memandang sikap positif terhadap disabilitas. Kemampuan seseorang tidak bisa dipandang dengan kesempurnaan fisiknya. Sebagai buktinya, Alquran memperlakukan khusus bagi kelompok minoritas disabilitas meskipun secara fisik terbatas, tetapi memiliki lahan ibadah yang baik. Disamping itu Allah membolehkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik tidak berperang di jalan Allah. Sebab mereka yang mempunyai alasan-alasan seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit, tetapi kalau memiliki keterbatasan fisik ingin ikut berperang mereka niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surganya yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Sebaliknya Islam sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai satu sama lain, dijelaskan di dalam Alquran Surah An-Nisa {4}:86

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

“Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (QS An Nisa ayat 86)

Berdasarkan ayat diatas bahwa kita harus menghormati sesama dan saling menghargai walaupun dia seorang yang cacat pun, yang membedakan di antara ketaqwaan dan keimanannya. Oleh karena itu, Allah pernah menegur Nabi Muhammad Saw ketika datangnya seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umri Maktub ingin bertanya kepada Nabi akan tetapi acuh tidak acuh terhadap nya. Penyandang disabilitas sering kali menjadi sorotan. Masyarakat golongan kelompok minoritas sering kali direndahkan bahkan dikucilkan oleh sebab itu Allah sangat melarang keras taskhir(menghina atau merendahkan) orang lain dengan alasan apapun, sebagaimana ditegaskan di dalam Alquran Surah al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi :



“Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka , dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk (pasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS Al Hujurat ayat 11)

Berdasarkan ayat yang diatas jangan lah kita mengolok-olok kaum disabilitas maupun memanggil dengan panggilan yang buruk atau pasik. pasti orang penyandang disabilitas tidak suka, kalau kita menghina atau panggilan yang buruk terhadap disabilitas pasti Allah akan memanggil yang buruk juga terhadap kita dan apabila kita menghina, mencela, mengolok-olok dan sampai memukul orang penyandang disabilitas pasti kitaa tentu menghina ciptaan Allah.

Kita seorang muslim tidak boleh mengolok-golok, menghina atau merendahkan golongan kelompok minoritas penyandang disabilitas sebab orang yang kita hina itu lebih baik dari kita . Setiap orang muslim kita harus menghormati sesama kita dan saling menghargai satu sama lain dan kita harus peduli kepada kaum disabilitas, jangan kita merendahkan, menghina atau mengucilkannya. Golongan kelompok minoritas penyandang disabilitas, kita harus mengulurkan tangan terbuka untuk membantu, membimbing dan merangkul, supaya orang disabilitas ini tidak minder dan mempunyai semangat untuk hidup. Dan masyarakat kita jangan memandang sebelah mata penyandang disabilitas ini walaupun kelompok penyandang disabilitas ini mempunyai kekurangan fisik tetapi dia tetap semangat menjalankan kehidupannya dan mungkin kaum disabilitas ini mempunyai kekurangan fisik akan tetapi mempunyai kelebihan yang besar dari kita yang tidak mempunyai kekurangan .

Jadi kita tetap harus mencotohi kehidupan orang penyandang disabilitas, orang penyandang disabilitas ini menjalankan kehidupan dengan semangat, kegembiraan, keceriaan dan selalu bahagia.walaupun mempunyai kekurangan fisik dia tidak menganggap kekurangan itu adalah kelemahan dia akan tetapi dia menganggap kekurangan itu adalah kelebihan dia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM

bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya.

Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut. Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009;⁶⁴ Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010.

Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa :

“hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.”⁶⁵

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut

⁶⁴ Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010

⁶⁵ Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010

juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional. Dari penjelasan di atas maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.⁶⁶

Dari penjelasan di atas maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam

⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi masih dalam tema yang sama dengan peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yaitu:

1. Penelitian atas nama Oca Pawalin (Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung) yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul ialah “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro di Provinsi Lampung” Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran Dinas Sosial kota metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi peran fasilitator, peran perwakilan pendidikan dan teknis dilakukan dengan baik tetapi tidak untuk itu adalah potensi penuh. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan pelatihan dan bantuan sosial. Jadi harus ada evaluasi untuk peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif dan berfokus pada peran teori peran, yaitu peran peran fasilitatif peran pendidikan dan teknis sebagai patokan representatif. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber data digunakan sebagai teknik validitas data. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini fokus kepada peran Dinas Sosial dalam memberdayakan

kaum penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kepada penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Hukum Islam.

2. Penelitian atas nama Mahendra Ramadhianto (Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) yang dilakukan pada tahun 2013 dengan judul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat Studi Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Hasil dari penelitian tersebut ialah peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat yaitu pemerintah melakukan rehabilitasi sosial terhadap warga penyandang cacat di Kabupaten Ponorogo dengan cara Pendekatan terhadap tokoh masyarakat Ds. Karangpatihan, Pendataan terhadap penyandang Cacat yang ada di Ds. Karangpatihan, Bimbingan lanjut terhadap penyandang cacat di Ds. Karangpatihan dan pada tahun 2011 kementerian sosial Republik Indonesia mendirikan Rumah Kasih sayang untuk membina para penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai keterampilan. Akan tetapi upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya minimnya anggaran APBD Kab. Ponorogo untuk penanganan cacat idiot, selain itu warga idiot rata – rata sudah lansia jadi susah untuk diberdayakan. Solusi terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu Pemerintah lebih mengoptimalkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat penderita Keterbelakangan mental atau idiot di Desa Karangpatihan dengan cara mendirikan atau membangun Rumah Kasih

Sayang yang berfungsi untuk membina para penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai keterampilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini fokus kepada peningkatan kesejahteraan kaum penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kepada penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Hukum Islam.

3. Novindri Dian Anggaraini yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Bandar Lampung pada tahun 2019). Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalahnya yaitu Hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses penyaluran bantuan jaminan sosial oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum optimal dikarenakan penyandang disabilitas yang semestinya menerima bantuan program bantuan jaminan sosial yang diberikan pemerintah ini banyak yang tidak tersalurkan langsung kepada penyandang disabilitas yang berhak menerimanya yang disebabkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tidak amanah dalam menjalankan tugasnya . Hukum Islam juga menjelaskan Allah melarang manusia untuk membedakan antara sesama manusia latar belakang, pendidikan, ataupun fisik seseorang, tetapi yang membedakan hanya aspek ketakwaan maka Allah menyukai orang yang berlaku adil yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa 58.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini fokus kepada pelaksanaan jaminan sosial menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas . Sedangkan penelitian yang penulis

lakukan adalah fokus kepada penerapan Pasal 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Karim

A. Buku

Khakim, Abdul , *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2009.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Miru, Ahmadi, Yodo, Sutarman , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2015.

Uwiyono, Aloysius, dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 2014.

Said Ali, As'ad, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.

Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Situmorang Basani et. Al., *Compendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta: 2012.

Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008

Sholihin, Bunyana, *Metodologi Penelitian Syariah*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2018.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007).

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Riyadi, Eko at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta, Pusham UII, 2012

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: 2003.

Lulu, Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Semarang: PT. Citra Aditya, 2009.

Soepomo, Iman, *Hukum Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta, : Djambatan, 1993

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1

Ismayanti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2014

S. Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

El Muhtaj, Madja, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, (Malang : Universitas Brawijaya Pers (UB Pers), 2013).

Subagyo, P. Joko , *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Melton Putra, 2011).

Saifullah, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: STAIN Malang, 2003).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

B. Jurnal

Iriyani, Eva (2017). *"Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia."* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.

C. Naskah Ilmiah

Anggraini,Noviandri Dian.2019. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. UIN Raden Intan Lampung.

Pawalin,Oca. 2017. Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro Provinsi Lampung. Universitas Lampung. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Ramadhianto,Mahendra.2013. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat Studi Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Banguna Gedung dan Lingkungan/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

E. Wawancara

Ahmad Farhan Imanuddin. Manager Bisnis Bank Amarta Cabang Lampung Selatan.

Ayu Pratiwi. Staff Marketing Bank Amarta Cabang Lampung Selatan.

Ibnu Hajar. Supervisor Bank Amarta Cabang Lampung Selatan.

F. Sumber Online

<https://amartha.com/>, (diakses pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 06.42 WIB).

<https://amartha.com/tentang-kami> (diakses pada tanggal 4 Maret 2020, pukul 00.54 WIB

<https://daksablog.wordpress.com/hari-internasional-penyandang-disabilitas-international-day-of-person-with-disabilities-idpwd/>, diakses pada 10 Juni 2020.

<https://whscorpora.co.id/investasi-syariah-di-amartha-bagi-hasil-bagi-rugi-hindari-riba/>; diakses tanggal 10 Juni 2020.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas> diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 20.08 WIB.